

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi organisasi non laba, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, memiliki hubungan kerjasama dengan banyak mitra dan banyak organisasi penyandang dana asing. Menurut, Sukmantoro, P. I. (2021) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu organisasi nonlaba memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti mitra usaha, dan organisasi penyandang dana asing.

Sebelum tahun 1997 saat terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba rujukan yang digunakan oleh para pelaku LSM adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama mengenai pembukuan, keuangan dan pemeriksaan/audit sebagainya.

Mursidi, R. (2021), sejak diterbitkannya PSAK No. 45, sejumlah LSM tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan oleh penyandang dana seperti donor, *grantor*, atau kontributor kepada mereka. Namun, tidak sedikit pula LSM yang belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LSM bukan hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di negara ini, tetapi memberikan dampak negatif juga berupa timbulnya kekhawatiran bagi masyarakat, sejak terjadi perubahan politik di era reformasi. Para aktivis LSM dan para konstituennya terhadap kemampuan para pelaku dan pelaksana LSM dalam menjaga kredibilitasnya dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program dan keuangan kelebagaanya. Pengerahan dana internasional yang tidak lagi mengenal batas negara semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas keuangan baik oleh para pemakai Laporan Keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di Indonesia, sistem, proses dan prosedur pengolahan informasi keuangan *accounting system, process and procedure* organisasi non laba, terutama di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai berkembang sejak awal tahun 1990-an, ketika sejumlah organisasi penyandang dana berpendapat bahwa pendampingan di bidang pengolahan informasi keuangan (*financial accounting*) dan pengelolaan keuangan (*financial management*) kepada LSM juga penting disamping pendampingan di bidang pengembangan program ataupun proyek.

Di LSM salah satu kenyataan yang sangat menonjol adalah laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan ialah laporan keuangan yang bertujuan memenuhi kepentingan para penyandang dana saja (*special purpose financial report*) dan bukan untuk berbagai pemakai laporan keuangan (*general purpose financial statemen*). LSM biasanya menyajikan informasi keuangan hanya sebagian saja, untuk masing-masing penyandang dana atau untuk masing-masing proyek atau program. Laporan keuangan yang mempertanggungjawabkan keadaan keuangan dan perkembangan hasil kegiatan organisasi secara keseluruhan tidak selalu disajikan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berupaya meningkatkan mutu informasi keuangan yang disajikan oleh organisasi non laba agar laporan keuangannya dapat memenuhi standar akuntansi keuangan yang diterima umum, sebagaimana disajikan dalam PSAK No. 45 dan pernyataan-pernyataan standar akuntansi keuangan lain yang relevan dalam bagi sektor organisasi non laba.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tanggal 1 Januari 2000. Pada tanggal 1 Januari 2020, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pernyataan penarikan standar akuntansi keuangan (PPSAK 13) yang berisi pernyataan pencabutan PSAK 45. Bersamaan dengan pernyataan pencabutan PSAK 45 IAI menerbitkan ISAK 35 yang bertujuan untuk memberikan pedoman penyajian laporan keuangan entitas non laba.

DSAK IAI menilai bahwa aturan penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAK 1: Penyajian laporan keuangan, sehingga 2 PSAK tidak perlu mengatur hal yang sama. Pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar (*tier*) yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi

pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 : Penyajian laporan keuangan dan PSAK 45 : Pelaporan keuangan entitas nonlaba. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba.

PSAK 1 mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba. Namun, PSAK 1 tidak memberikan pedoman bagi entitas dengan aktivitas nonlaba yang menerbitkan laporan keuangannya, yang mungkin memiliki istilah dan topik yang berbeda dengan entitas nonlaba.

Menurut Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan (2022), menjelaskan bahwa, PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, *paragraph 05* menyatakan bahwa “Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi nonlaba, termasuk entitas bisnis sektor publik, jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.” Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non laba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas nonlaba dalam interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi nonlaba.

Menurut Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan (2022), menjelaskan bahwa karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menurut Buku Panduan Standar Akuntansi Keuangan (2022), menjelaskan bahwa penggunaan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Akuntan yang menyusun manual akuntansi keuangan untuk kepentingan sejumlah penyandang dana dan mitra-mitra yang menugaskannya tampaknya masih sangat sedikit. Tidak ada pembahasan yang komprehensif mengenai sistem, proses, prosedur, dan teknik pengelolaan informasi keuangan organisasi non laba, terutama yang memperhatikan khusus kepentingan LSM di Indonesia-

Banyak transaksi yang dilakukan oleh LSM adalah transaksi penerima dana hibah, dana program, sumbangan dan transaksi pengeluaran untuk membiayai program, proyek atau kegiatan yang di danai para penyandang dana nasional dan juga internasional seperti Pekerti, TIFA, Yayasan Mitra Mandiri, USC Satunama, Yayasan Kehati, *European Union*, *The Ford Foundation*, *The Asia Foundation*, *Hivos*, serta *CARE International*. Frekuensi dan jenis transaksi yang terjadi karena penerimaan dan pengeluaran dana dari hasil kegiatan sendiri masih sangat jarang, jika ada nilainya pun tidak sebesar biaya program yang diberikan oleh Lembaga Peyandang Dana. Semakin banyak penyandang dana mendanai program, maka semakin berat pekerjaan yang harus dilakukan oleh LSM untuk mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran/biaya yang terjadi.

Dari uraian latar belakang diatas dimana adanya perubahan aturan mengenai pelaporan keuangan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35, serta kurangnya artikel mengenai analisa laporan keuangan organisasi non laba atau NGO (*Non-Govermental Organization*) yang bersifat professional dimana kegiatannya berfokus pada keterampilan dan keahlian di bidang tertentu (dalam hal ini penulis mengambil studi kasus LSM Kelapa Sawit). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan**

Berdasarkan ISAK No. 35 pada Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba (Studi Kasus pada Organisasi Nonlaba Serikat Petani Kelapa Sawit)”

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah metode pencatatan pelaporan keuangan yang digunakan Serikat Petani Kelapa Sawit?
- 2) Apakah pencatatan pelaporan keuangan yang disajikan Serikat Petani Kelapa Sawit telah menerapkan standar yang tertuang di dalam ISAK 35 mengenai organisasi non laba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menganalisis metode pencatatan pelaporan keuangan di Serikat Petani Kelapa Sawit sebagai organisasi non laba.
 - b. Untuk menganalisis penerapan standar pelaporan keuangan Serikat Petani Kelapa Sawit masih menggunakan PSAK No. 45 atau sudah menggunakan ISAK 35.
- 2) Kegunaan Penelitian :
 - a. Kegunaan teoritis:
 1. Kegunaan bagi Serikat Petani Kelapa Sawit :
 - a) Sebagai dasar dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35.
 - b) Sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan Serikat Petani Kelapa Sawit yang transparan dan akuntabel.
 2. Kegunaan bagi donor/penyandang dana
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penyandang dana mengenai pengelolaan keuangan sudah digunakan dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap penyandang dana dan dapat meningkatkan keberlangsungan programnya.
 3. Kegunaan bagi pembaca
 - a) Sebagai sumber informasi mengenai penyajian laporan keuangan untuk organisasi non laba.

b) Menambah wawasan serta pengetahuan tambahan mengenai akuntansi untuk organisasi non laba.

4. Kegunaan bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta memberi kontribusi dalam dunia akuntansi terutama jurusan Akuntansi mengenai ISAK 35 dan juga sebagai acuan bagi para adik tingkat yang kelak akan melaksanakan skripsi di Universitas Nasional.

b. Kegunaan Praktis :

1. Kegunaan bagi penulis adalah mendapat wawasan serta pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35.
2. Kegunaan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi.

